



Judul : RUU TNI Resmi disahkan: Menhan: Tenang Ya, nggak usah khawatir
Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 7

RUU TNI Resmi Disahkan Menhan: Tenang Ya, Nggak Usah Khawatir

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena UU TNI yang baru ini tidak mengembalikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan

atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang oleh DPR dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

Menhan: Tidak Ada Dwifungsi Dan Wajib Militer Di UU TNI Baru

Menhan: Tenang Ya

... DARI HALAMAN 1

Maharani Puan didampingi Wakil Ketua DPR, Saifan Mustopa, Adies Kadir dan Sulaiman Dasco Alimud. Sementara Pemerintah diwakili Menteri Pertahanan Sjafriz Samsuodidin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil

Menteri Koordinator Thomas Duvandono dan Menteri Sekretaris Negara Purnomo Hadji.

Mengawali sidang, Puan menyampaikan, ada 293 anggota dewan yang hadir dan dari itu 12 orang. Sehingga rapat diwarnai kecuran dan dia mempersilakan Ketua Panitia RUC TNI Utat Adianto menyampaikan laporan pembahasannya.

Dalam laporannya, Utat menyampaikan, pembahasan RUC TNI telah melalui pertimbangan aspek legalitas formal yang dibahas berdasarkan prosedur sah, termasuk rapat-rapat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Selain itu Komisi DPR telah menerima surat dari Presiden dan DPR untuk membahas revisi UU TNI tersebut.

Ketua Komisi DPR ini mengungkapkan ada tiga pasal yang masuk dalam revisi UU TNI, yaitu Pasal 3, Pasal 42, dan Pasal 53. Ketiga pasal itu mengatur

tentang kedudukan TNI, perluasan pos jabatan sipil yang bisa diduduki tentara aktif, dan perpanjangan masa usia pensiun prajurit mulai dari 55 tahun untuk tentara hingga 63 tahun untuk perwira tinggi bintang empat.

Politis PDIP ini juga memastikan tak ada pembahasan dwifungsi TNI direvisi UU ini. "Dengan ini, kami mengajukan agar RUC ini dapat disetujui menjadi Undang-Undang," ucapnya.

Selepas Utat menyampaikan laporannya, Puan bertanya kepada anggota Dewan yang hadir.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. "Setuju," jawab peserta sidang dengan diiringi ketukan palu tanda pengesahan.

Berkutnya, giliran Menteri Pertahanan Sjafriz Samsuodidin yang diberi kesempatan bicara mewakili Pemerintah. Menhan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terlibat dalam pembahasan revisi UU TNI. Dia mengatakan, perhatian elemen masyarakat dalam perumusannya menunjukkan persatuan dan kerukunan bangsa.

Sjafriz mengatakan, hal itu juga sejalan dengan prinsip TNI yang menjamin persatuan nasional untuk seluruh masyarakat. "Saya mengajak kita semua

untuk bersatu, bersahabat untuk memikul beban yang besar," ucapnya.

Selain itu, Sjafriz menyampaikan, tidak ada wajib militer dalam UU TNI yang baru. Termasuk dwifungsi militer yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, konsep fungsi ganda militer itu sudah menjadi sejarah.

Sjafriz juga mengatakan tidak ada prajurit aktif yang dapat mengisi jabatan di luar 14 Kementerian Lembaga yang telah diatur di UU TNI Pasal 47. Anggota lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional, Sekretariat negara yang menangani urusan sekretariat presiden dan sekretariat menteri presiden, lembaga Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan demikian, Sjafriz meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang aturan baru dalam UU TNI tersebut. Pemerintah kini dia menyarankan tentara aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan harus mengundurkan diri atau pensiun.

Menurutnya, UU TNI yang terbaru juga masih melarang prajurit aktif berbisnis karena yang menjadi perhatian ialah kesejahteraan TNI.

Tidak ada semua, mulai Bulog, semua pemutarawan, jadi tenang saja ya

Nggak usah khawatir lah," ujarnya.

Di Demo

Di saat yang sama, pengesahan revisi UU TNI diwarnai aksi demonstrasi dari sejumlah lapisan masyarakat. Mereka memunculkan penolakan pengesahan karena selama revisi dibahas, minim partisipasi publik.

Mengjawab hal itu, Puan memisahkan hal-hal yang memuat kekawatiran dan disahkannya UU TNI tidak akan terjadi. "Apa yang dicitra bahwa ada bentuk baru yang revisi UU TNI tidak sesuai dengan yang diharapkan, insyaallah tidak," ujarnya usai sidang.

Ketua DPP PDIP ini juga berharap UU TNI yang baru disahkan disahkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebab kini Puan dalam pembahasannya DPR dan pemerintah telah mendengarkan masukan dan aspirasi berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian fokus pembahasan revisi UU TNI memenuhi asas legalitas.

"Kami juga sudah menjelaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, hak-hak demokrasi, hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional," tandasnya. ■ rru